

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masyarakat membutuhkan suatu lahan untuk menjadi tempat tinggal. Lahan yang terbatas seiring dengan angka penduduk yang tinggi begitu kontras hingga menyebabkan kurangnya lahan untuk tempat tinggal. Lahan di daerah perkotaan juga menjadi semakin mahal seiring dengan tingkat permintaan yang semakin tinggi. Selain keterbatasan lahan, faktor ekonomi masyarakat juga menyebabkan mereka kemudian memilih untuk membangun tempat tinggal di pinggir kota dengan harga yang lebih terjangkau. Fenomena terkait permukiman yang dibangun di area-area yang tidak seharusnya digunakan untuk bermukim juga masih sering ditemukan. Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab munculnya kawasan permukiman liar sehingga memunculkan kawasan permukiman yang kumuh.

Permukiman kumuh ini identik dengan masalah kemiskinan di suatu negara (Rahajuni et al., 2020). Hal ini dikarenakan bahwa pada umumnya, masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh termasuk ke dalam golongan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa permukiman kumuh secara kontras memperlihatkan adanya kesenjangan sosial jika dibandingkan dengan permukiman yang memang layak untuk dihuni. Dalam aspek pemerintahan, permukiman kumuh juga dapat memberikan citra negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah karena terkesan gagal dalam memberikan pelayanan dan memfasilitasi kebutuhan setiap warga negaranya (Rizka et al., 2018). Apabila dibiarkan, masalah ini akan menjadi kompleks dan memancing permasalahan-permasalahan lainnya.

Masalah permukiman kumuh ini sangat banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia (Fitri, 2020). Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, luas permukiman kumuh di Indonesia pada tahun 2019 telah mencapai 87.000 hektar. Angka ini meningkat dua kali lipat dari lima tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 yang memiliki total seluas 38.000 hektar (Wicaksono, 2019). Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang menyumbang luas permukiman kumuh dengan angka yang cukup besar yaitu sekitar 7.300 hektar pada tahun 2019 (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019).

Salah satu kabupaten yang memiliki permukiman kumuh yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Demak. Jalur Pantura yang melintasi Kabupaten Demak, membuat Demak menjadi urat nadi perekonomian di Pulau Jawa dan kemudian berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, 2021). Hal ini berdampak pada adanya perkembangan di seluruh bidang kegiatan misalnya pada sektor industri yaitu adanya perluasan area dengan dibangunnya pabrik-pabrik di lahan tertentu yang sebelumnya difungsikan sebagai lahan permukiman warga. Adanya perluasan ini secara otomatis memicu permasalahan terkait turunnya kualitas dari lingkungan karena pencemaran limbah industri yang tinggi (Yunia Rahayuningsih, 2017). Akibatnya, terjadi kepadatan di area permukiman warga karena sebagian lahannya dialih-fungsikan menjadi area industri.

Sebagian wilayah di Kabupaten Demak merupakan wilayah pesisir. Hal ini membuat Demak juga terkenal dengan permasalahan banjir dan rob yang sering melanda Demak. Permasalahan sampah juga semakin memperparah kondisi

tersebut sehingga membuat kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Demak semakin meluas dan sulit untuk dikendalikan. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Demak Tahun 2016 No.475.26/319 Tahun 2016, total luas permukiman kumuh di Kabupaten Demak adalah 367,99 hektar yang teridentifikasi berada di 25 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Demak (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019). Dengan letaknya yang strategis dan berperan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah, luasnya kawasan kumuh di Kabupaten Demak ini dapat menjadi sebuah ancaman terutama di bidang perekonomian karena dapat menghambat kegiatan perekonomian yang terjadi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh mengingat tingginya angka kawasan kumuh seperti yang terjadi di Kabupaten Demak. Selain itu, pemerintah harus melakukan suatu upaya untuk menangani permasalahan permukiman kumuh ini sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 yang mengamanatkan pembangunan kawasan perkotaan melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan permukiman kumuh yang semakin meluas, dan penghidupan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, pemerintah membuat suatu program berkelanjutan yaitu Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai aksi nyata dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam menangani permukiman kumuh di kawasan Perkotaan.

Program KOTAKU merupakan suatu program yang dijadikan sebagai upaya strategis Ditjen Cipta Karya untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di seluruh Indonesia. Program KOTAKU dilaksanakan sejak tahun 2016 di 271 kabupaten/kota di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Tujuan umum diciptakannya program ini adalah agar dapat terwujudnya kota layak huni, produktif dan berkelanjutan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018). Program ini diwujudkan dengan melakukan berbagai rangkaian kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kelurahan/desa. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat menurunkan luas permukiman kumuh dan meningkatkan akses infrastruktur di kawasan permukiman dan pelayanan dasar di permukiman kumuh di perkotaan.

Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, Ditjen Cipta Karya menginisiasi agar Program KOTAKU dapat dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama untuk menangani permasalahan permukiman kumuh. Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan program ini untuk menanggulangi masalah permukiman kumuh di wilayah Demak. Program ini diselaraskan dengan Surat Keputusan Bupati Demak No.475.26/319 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh Perkotaan Kabupaten Demak sebagai acuan pelaksanaan wilayah yang menjadi sasaran dari Program KOTAKU.

Tabel 1. 1 Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak

No	SK BUPATI NO.475.26/319 TAHUN 2016		2017		2018		2019		2020	
	KAWASAN KUMUH	JUMLAH	TER- TANG ANI	CAPAI AN S/D	TER- TANG ANI	CAPAI AN S/D	TER- TANG ANI	CAPAI AN S/D	TER- TANG ANI	CAPAI AN S/D
	REALIS ASI (Ha)	367,99	9,00	9,00	42,95	51,95	159,08	211,03	40,57	251,6
	REALIS ASI (%)		2,45%			14,12%		57,35%		68,37%

Sumber: Data KOTAKU Kab. Demak, 2021

Berdasarkan data yang diperoleh dari Materi Teknis Raperda DINPERKIM Kabupaten Demak di atas, terlihat bahwa setelah adanya Program KOTAKU, luas permukiman kumuh di Kabupaten Demak mengalami penurunan yang ditunjukkan dari data pada tahun 2019 bahwa 159,08 hektar Kawasan kumuh di Demak telah ditangani dan realisasi penanganan permukiman kumuh meningkat drastis hingga mencapai 57,35% (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, 2021). Hal ini berarti bahwa Program KOTAKU yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Ditjen Cipta Karya memiliki pengaruh penting terhadap penurunan luas permukiman kumuh di Kabupaten Demak.

Dalam pelaksanaannya yang dimulai sejak tahun 2017, program ini memiliki fokus awal yaitu di 10 desa/kelurahan di Kabupaten Demak yaitu: Kelurahan Bintoro, Kelurahan Kadilangu, Desa Bango, Desa Kalikondang, Desa Turirejo, Desa Kedondong, Desa Mulyorejo, Desa Raji, Desa Sedo, dan Desa Tempuran (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, 2021). Pada tahun 2018, terdapat dua wilayah yang menjadi fokus utama pembangunan yaitu Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro. Pelaksanaan Program KOTAKU berjalan cukup efektif di kedua wilayah, terlihat dari pembangunan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh yang ada seperti dengan

dibangunnya drainase, jalan baru (paving), penanganan resiko kebakaran, dan pengadaan moda persampahan (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, 2019). Tampilan permukiman berubah menjadi lebih baik dan tertata rapi. Hal inilah yang kemudian menunjukkan adanya keberhasilan dalam implementasi Program KOTAKU di kedua wilayah.

Berdasarkan SE Ditjen Cipta Karya No.40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program KOTAKU, keberhasilan implementasi Program KOTAKU ini dapat diukur melalui indikator kinerja keberhasilan yang terdiri dari dua indikator kinerja utama yaitu indikator dampak (*outcome*) dan indikator kinerja (*output*). Dalam hal ini, indikator dampak (*outcome*) program, mencakup realisasi perwujudan permukiman perkotaan layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Terkait indikator kinerja, dalam hal ini mencakup beberapa indikator yaitu peningkatan kemampuan masyarakat terkait penyusunan rencana penanganan kawasan kumuh, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan program, dan kontribusi dalam melakukan pengurangan luas kawasan kumuh.

Program KOTAKU yang dilaksanakan di kedua wilayah merupakan program yang sama dengan indikator program yang sama pula. Akan tetapi, hasil dari program yang dilaksanakan di kedua wilayah tersebut memiliki perbedaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan program tersebut. Desa Kalikondang dijadikan sebagai *best practice* pelaksanaan Program KOTAKU di Kabupaten Demak berhasil mendapatkan penghargaan kategori Penanganan Permukiman Kumuh Terbaik Tingkat Kelurahan/Desa se-Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun

2018 (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, 2020). Melihat dari indikator dampak (*outcome*) di kedua wilayah, tidak ada perbedaan yang ditunjukkan. Baik Desa Kalikondang maupun Kelurahan Bintoro, keduanya berhasil dalam mewujudkan permukiman perkotaan layak huni dengan melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur berdasarkan permasalahan yang ada di masing-masing wilayah dan luas permukiman kumuh menjadi berkurang. Akan tetapi, perbedaan terlihat pada indikator kinerja (*output*) dalam implementasi program di kedua wilayah.

Dalam hal ini, kelembagaan merupakan salah satu faktor penting dalam indikator kinerja (*output*) dalam implementasi Program KOTAKU. Kelembagaan yang baik dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada melalui kolaborasi dan koordinasi antar sumber daya tersebut, menjadi salah satu penilaian dalam menentukan keberhasilan implementasi Program KOTAKU di suatu wilayah. Desa Kalikondang berhasil dalam implementasinya dan mendapatkan penghargaan karena dipengaruhi oleh adanya kelembagaan yang baik di tingkat masyarakat. Keberhasilan implementasi Program KOTAKU di Desa Kalikondang dapat dilihat baik dalam *outcome* maupun *output*-nya. Hal inilah yang membedakan dengan keberhasilan yang ada di Kelurahan Bintoro.

Dalam pelaksanaannya, Kelurahan Bintoro belum dapat memberikan hasil yang terbaik dalam indikator kinerja tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi program di Kelurahan Bintoro tidak menunjukkan tingkat keberhasilan yang sama dengan Desa Kalikondang. Hasil dan manfaat pasca program di Kelurahan Bintoro juga tidak menunjukkan keberlanjutan yang

signifikan sebagaimana yang terjadi di Desa Kalikondang. Walaupun program sudah dilaksanakan lima tahun yang lalu, manfaat program tersebut masih dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Kalikondang. Dengan demikian, penelitian ini ingin melihat mengenai perbandingan keberhasilan implementasi Program KOTAKU di kedua wilayah yaitu Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro sehingga dapat dilihat mengenai apa saja faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan tingkat keberhasilan dari implementasi di kedua wilayah tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program KOTAKU di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro sebagai upaya untuk mengatasi permukiman kumuh di Kabupaten Demak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi Program KOTAKU di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro sebagai upaya untuk mengatasi permukiman kumuh di Kabupaten Demak.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, serta dapat memberikan manfaat dan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu sosial dan



politik, khususnya mengenai relasi antar aktor yang terjadi dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Untuk menambah dan memperdalam wawasan keilmuan dari ilmu pemerintahan terutama terkait Tata Kelola Pemerintahan.
- b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah dalam melihat dan mengevaluasi terkait program yang dijalankan.

#### 1.5 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dari penelitian ini, yang digunakan sebagai acuan dan tolak ukur dalam menganalisis lebih lanjut terkait penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Judul Karya Ilmiah	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan
1.	Implementasi Program Kotaku dalam Revitalisasi Daerah Kumuh di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang.  Peneliti: Rani Eliza Zethary & Hartuti Purnaweni, 2019	Deskriptif Kualitatif	Berfokus pada bagaimana implementasi terkait Program Kotaku dalam Revitalisasi Daerah Kumuh di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang.	1. Menurut SE Menteri PU Nomor 40 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, terdapat 4 tahapan dalam implementasi program Kotaku yaitu tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan. Tahap persiapan dilakukan oleh Korkot dan BKM dengan komitmen dari pemangku kepentingan yang lain dengan diawali dari penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman, hingga

No	Judul Karya Ilmiah	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan
				<p>penanganan sosial yang kemudian dibentuk <i>Detailed Engineering Design</i> (DED). Tahap pelaksanaan, telah terlihat dampak dan manfaat yang sudah dirasakan langsung oleh masyarakat Rejomulyo. Pada tahap keberlanjutan, terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat yang mana pemerintah telah menyebutkan bahwa keberlanjutan dari program ini sudah berjalan dengan baik, tetapi masyarakat mengatakan bahwa untuk keberlanjutan dari program itu sendiri masih tidak jelas karena dana yang tidak ada sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahap ini masih belum terlihat konsistensinya.</p> <p>2. Faktor yang mendukung impelentasi ini berjalan dengan lancar yaitu SDM yang memadai, disposisi yang berjalan dengan baik, komunikasi yang terjalin dengan baik, dan karakteristi dari birokrasi yang sudah cukup baik. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain adalah karena keterlambatan anggaran dan persetujuan, serta pola pikir masyarakat yang masih sulit untuk menerima dan memberikan ijin.</p>

No	Judul Karya Ilmiah	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan
2.	<p>Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh (Studi pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang).</p> <p>Peneliti: Vian Frisca Aisyahwati, 2018</p>	Kualitatif Deskriptif	Berfokus pada implementasi program sebagai upaya untuk penanganan kawasan kumuh di BKM Gading Kasri Kecamatan Klojen Kota Malang KOTAKU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KOTAKU di Kelurahan Gadingkasri dengan dilakukannya penyusunan profil yang sesuai dengan indikator kumuh dan melakukan berbagai strategi untuk mencegah dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk menangani masalah permukiman kumuh.</li> <li>2. Terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi program, salah satunya yaitu kesadaran masyarakat yang kurang dalam menyukseskan program dan adanya kesulitan dalam menata bangunan permukiman akibat masih terdapat beberapa rumah yang belum memiliki IMB.</li> </ol>
3.	<p>Perbandingan Keberhasilan Implementasi Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Desa Nyalembeng dan Desa Gambuhan Kabupaten Pemalang Tahun 2015</p> <p>Peneliti: Arinta Sistyanika, Achmad Taufiq, Wachid Abdulrahman, 2015</p>	Kualitatif	dan Desa Gambuhan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi program desa siaga aktif yang dilaksanakan di Desa Nyalembeng telah terlaksana secara optimal yang ditunjang oleh sumber kebijakan yang dimiliki sudah memadai sehingga berperan dalam keberhasilan implementasi program tersebut.</li> <li>2. Sedangkan implementasi program di Desa Gambuhan tidak berjalan optimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sumber kebijakan belum memadai, Forum</li> </ol>

No	Judul Karya Ilmiah	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan
				Kesehatan Desa (FKD) sebagai organisasi pelaksana utama belum berfungsi, serta tidak adanya komitmen untuk melangsungkan program desa yang terjalin antar para implementator program itu sendiri.
4.	Perbandingan Keberhasilan Implementasi Program Pamsimas Kampung Pasar Pagi dan Kampung Tegal Sari di Nagari Lunang Satu  Peneliti: Endah Kurnia & Lince Magriasti, 2022	Kualitatif Semu (quasi kualitatif)	Berfokus pada perbedaan keberhasilan implementasi program Pamsimas yang dilakukan di Kampung Pasar Pagi dan Tegal Sari.	1. Implementasi program Pamsimas yang dilaksanakan di Kampung Pasar Pagi sudah berjalan secara optimal sedangkan di Kampung Tegal Sari belum optimal. 2. Keberhasilan implementasi program tersebut dipengaruhi oleh adanya faktor perencanaan, faktor partisipasi atau sikap masyarakat, serta faktor kondisi yang berbeda pada kedua desa.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat terlihat bahwa implementasi Program KOTAKU yang dilaksanakan di beberapa wilayah, sebagian telah dijalankan dengan lancar. Hal tersebut dilihat dari beberapa tujuan dan indikator-indikator dari program yang telah tercapai, serta manfaat yang sudah dirasakan secara langsung oleh sasaran dari program ini sendiri, yaitu masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Dalam implementasinya, program ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat proses berjalannya program sehingga hal inilah yang menentukan tingkat keberhasilan dari implementasi program ini. Keberhasilan dari implementasi program yang dilaksanakan di suatu wilayah tersebut dapat menjadi pembanding dengan program

yang sama tetapi dilaksanakan di wilayah yang berbeda dan dengan hasil yang berbeda pula. Adanya faktor-faktor perbandingan ini dapat menjadi tolak ukur mengapa hasil dari implementasi program yang sama di kedua desa dapat berbeda.

Beberapa penelitian terdahulu yang diambil, belum ditemukan adanya penelitian yang berfokus terhadap perbandingan keberhasilan dalam implementasi Program KOTAKU. Hal inilah yang menjadi acuan untuk membahas mengenai perbandingan mengenai implementasi program, sehingga perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih difokuskan untuk melihat perbandingan dari keberhasilan implementasi Program KOTAKU. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada program yang menjadi fokus penelitian yang berbeda yang mana pada penelitian ini yaitu membahas mengenai Program KOTAKU atau Program Kota Tanpa Kumuh, serta lokasi penelitian yang diambil juga memiliki perbedaan yakni di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro Kabupaten Demak. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada pembahasan dengan analisis mengenai implementasi dari suatu program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

## **1.6 Landasan Teori**

### **1.6.1 Implementasi Program**

Implementasi menurut Grindle (dalam Imronah, 2009), merupakan suatu proses umum terkait tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses ini baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Dalam konsep Grindle tersebut, implementasi kebijakan ini

mengubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Pandangan ini sesuai dengan konsep milik Van Meter dan Horn yang menyebutkan bahwa tugas implementasi pada dasarnya adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak/kelompok yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Implementasi dari suatu program kebijakan merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah proses perumusan kebijakan. Apabila suatu program tidak diimplementasikan, maka perumusan kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya akan sia-sia (Abdoellah & Rusfiana, 2016). Oleh karena itu, tahap implementasi ini merupakan tahapan yang memiliki kedudukan penting dalam suatu tahapan kebijakan publik agar dapat memberikan manfaat yang dapat diterima langsung oleh kelompok sasaran.

Suatu program yang telah dipilih untuk dilaksanakan, tidak memiliki jaminan bahwa program tersebut sudah pasti berhasil dalam implementasinya. Terdapat berbagai macam dan bentuk variabel yang dapat memengaruhi tingkat keberhasilan dari implementasi suatu program yang bersifat perorangan maupun kelompok atau institusi (Subarsono, 2012). Variabel-variabel tersebut saling berhubungan dan memiliki keterikatan satu sama lain sehingga dapat memengaruhi proses dari implementasi. Dari variabel-variabel yang ditemukan dalam proses pelaksanaan program tersebut-lah yang akan menunjukkan faktor apa saja yang menyebabkan suatu program dapat dikatakan berhasil atau belum berhasil dalam implementasinya.

Menurut teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan Horn (1975), terdapat beberapa variabel yang dapat memengaruhi kinerja dari suatu implementasi. Mereka mengemukakan bahwa efektivitas dari suatu implementasi dapat menunjukkan keberagaman tergantung pada tipe dan isu kebijakan, sehingga dalam hal ini penting untuk membedakan isi (*content*) dari kebijakan tersebut (Anggara, 2014). Dalam pandangan mereka tersebut, menunjukkan bahwa tipe kebijakan membutuhkan karakteristik proses, struktur, dan hubungan antarfaktor yang berbeda dalam implementasinya.

Teori milik Van Meter dan Horn tersebut kemudian menegaskan bahwa terdapat enam variabel yang dapat memengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi sehingga harus diperhatikan (Subarsono, 2012). Variabel tersebut antara lain yaitu:

- a. Tujuan dan standar kebijakan. Suatu program atau kebijakan harus memiliki tujuan dan standar yang jelas dan terukur. Hal ini dapat dengan melakukan perincian terkait sasaran dari program yang ingin dicapai melalui program dan standar capaian dari program itu sendiri sehingga dapat direalisasikan. Tujuan dan standar yang tidak jelas akan berpotensi terhadap timbulnya misinterpretasi atau multiinterpretasi sehingga mudah memicu terjadinya konflik di antara para pelaku implementasi program.
- b. Sumberdaya. Keberhasilan suatu implementasi program, dapat bergantung terhadap bagaimana pemanfaatan terhadap sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya dalam implemetasi kebijakan ini dapat berupa sumberdaya manusia maupun non-manusia (dana atau insentif lain) yang dapat menjadi

fasilitas pendukung sehingga dapat memengaruhi tingkat keefektifan implementasi dari suatu program. Sumberdaya yang digunakan juga harus memiliki kualitas dan kompetensi yang bagus untuk menunjang keberhasilan proses implementasi program.

- c. Hubungan antar organisasi. Keberhasilan implementasi dari suatu program, perlu didukung dengan koordinasi antar instansi yang seringkali menghendaki adanya mekanisme dari suatu kelembagaan dengan lembaga yang memiliki struktur lebih tinggi memiliki kontrol terhadap implementasi agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, hubungan antar organisasi juga memerlukan suatu koordinasi dan komunikasi yang tercipta agar dapat menunjang keberhasilan dalam implementasi suatu program.
- d. Karakteristik agen pelaksana. Kinerja implementasi dari suatu program, dapat ditentukan dengan ketepatan antara ciri-ciri program dengan karakteristik para agen pelaksananya. Karakteristik ini memiliki cakupan yaitu struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan baik formal maupun informal yang terjadi dalam birokrasi sehingga dapat menunjukkan kontrol dari hierarki pada unit pelaksana terbawah saat implementasi. Selain itu, adanya dukungan politik dari lembaga lain seperti eksekutif dan legislatif dapat memengaruhi keberhasilan implementasi dari suatu program.
- e. Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Keberhasilan dari implementasi suatu program dapat dipengaruhi oleh ketiga variabel yang



mencakup kondisi sumberdaya ekonomi; dukungan kelompok kepentingan terhadap program; karakteristik partisipan (mendukung atau menolak); sifat opini publik di lingkungan implementasi; dan respon dari elite politik apakah mendukung implementasi tersebut atau tidak. Kondisi lingkungan ini dapat berpengaruh banyak terhadap kinerja dari implementasi, apabila kondisi lingkungan tidak kondusif maka proses implementasi program juga dapat berpotensi mengalami kegagalan.

- f. Disposisi agen pelaksana. Disposisi ini merupakan tanggapan dari para pelaksana/implementator program yang dapat berupa sikap penolakan atau penerimaan. Sikap ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap proses berjalannya implementasi program. Disposisi ini mencakup tiga hal penting, yaitu: (1) respon para implementator terhadap program, hal ini berpengaruh terhadap sikap dan kemauan mereka dalam melaksanakan program nantinya; (2) kognisi atau pengetahuan dan pemahaman para implementator terhadap isi dan tujuan dari program itu sendiri; (3) intensitas sikap atau preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

Dari teori tersebut, terlihat bahwa implementasi yang dilakukan terhadap suatu program dapat dipengaruhi oleh berbagai macam variabel. Melalui variabel-variabel ini lah yang nantinya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari suatu program yang diimplementasikan. Model implementasi milik Van Meter dan Horn tersebut, menekankan pada adanya keterikatan yang seringkali tidak berbentuk sempurna antara ketetapan awal dari program dengan realisasi dari pelaksanaan program yang dilakukan.

## **1.7 Operasionalisasi Konsep**

### **1.7.1 Konsep Implementasi Program**

Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn (dalam Imronah, 2009), implementasi program merupakan tahapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memungkinkan terciptanya jaringan dari realisasi kebijakan publik dengan melibatkan berbagai pihak tertentu. Dari konsep tersebut, dijelaskan lebih lanjut bahwa setiap implementasi pasti dapat dipengaruhi oleh berbagai macam aspek yang dapat menunjang bagaimana hasil dari implementasi tersebut. Berhasil atau tidaknya implementasi dari suatu program, dapat dipengaruhi oleh berbagai bentuk variabel yang mungkin muncul selama proses pelaksanaannya. Menurut teori yang telah dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2012), variabel-variabel yang dapat memengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu program tersebut antara lain:

- a. Tujuan dan standar kebijakan. Memiliki perincian yang jelas terhadap tujuan dan standar dari suatu program merupakan salah satu hal penting untuk dilakukan agar program dapat direalisasikan dengan baik. Terkait implementasi Program KOTAKU, variabel ini merujuk pada tujuan dan standar program yang ditetapkan, mulai dari penyusunan acuan dalam pelaksanaan program, pedoman-pedoman yang digunakan sebagai standar dalam pelaksanaan program, rincian mengenai penentuan lokasi wilayah yang menjadi sasaran program, dan pelaksanaan di wilayah secara detail.
- b. Sumberdaya. Keberhasilan implementasi dapat bergantung kepada pemanfaatan yang dilakukan terhadap sumberdaya yang tersedia. Dalam

implementasi Program KOTAKU ini, sumberdaya yang disebutkan berupa non-manusia (dana atau insentif) maupun sumber daya manusia yang dapat menjadi fasilitas pendukung. Sistem pendanaan dalam hal ini diuraikan mulai dari sumber dana, penyaluran dana, dan pengelolaan dana dalam pelaksanaan program. Sedangkan sumber daya manusia atau kelompok/organisasi yang menjadi pelaksana program, dijelaskan dengan menguraikan para pelaksana di tingkat kabupaten yaitu Tim Pokja PKP dan Tim KOTAKU, serta di tingkat lingkungan yaitu pemerintah desa/kelurahan, BKM, dan KSM/Pokmas. Kemudian, diuraikan pula mengenai pembentukan pelaksana tersebut baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

- c. Hubungan antar organisasi. Koordinasi dan komunikasi yang baik dari instansi pelaksana program, dapat mendorong keberhasilan dari implementasi suatu program. Dalam hal ini, hubungan antar organisasi dijelaskan dengan menguraikan peran dan hubungan yang terjalin dari setiap tingkatan pelaksana Program KOTAKU. Hubungan ini berupa koordinasi dan komunikasi yang dapat dilihat pula dalam bentuk pengawasan sehingga menunjukkan adanya kontrol dari lembaga yang lebih tinggi dalam pelaksanaan program agar dapat sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
- d. Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik yang dikehendaki agar dapat mendorong kinerja implementasi yaitu memiliki cakupan struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan baik formal maupun informal yang terjadi

dalam birokrasi sehingga dapat menunjukkan kontrol dari hierarki pada unit pelaksana terbawah saat implementasi. Variabel ini diuraikan dengan penjelasan mengenai karakteristik yang dimiliki dari masing-masing pelaksana program (kesesuaian antara tupoksi dari birokrasi dengan tugas sebagai pelaksana program) dan struktur organisasi pelaksana yang dapat dilihat dari hubungan antar organisasi yang telah diuraikan sebelumnya sehingga terlihat struktur hierarki yang jelas antar pelaksana program.

- e. Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Kondisi lingkungan ekonomi dalam hal ini mencakup karakteristik ekonomi masyarakat di wilayah sasaran. Kondisi perekonomian masyarakat menjadi dasar dari penentuan target wilayah yang akan dijadikan sebagai sasaran Program KOTAKU. Selain itu, karakteristik ekonomi masyarakat di wilayah sasaran juga dapat menentukan kondisi sosial masyarakat seperti opini dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program. Kondisi politik dalam hal ini mencakup respon dari elit politik (mendukung atau menolak) dan intervensi-intervensi yang dilakukan oleh elit politik terhadap program baik itu sebelum maupun sesudah pelaksanaan. Dengan hal ini, dapat dilihat bagaimana pengaruh dari kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, terhadap keberhasilan implementasi Program KOTAKU.
- f. Disposisi agen pelaksana. Disposisi atau tanggapan dari para pelaksana merupakan salah satu variabel lain yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi. Dalam konteks implementasi Program KOTAKU, disposisi agen pelaksana ini berupa tanggapan yang mencakup sikap pelaksana

(menolak atau menerima), pemahaman pelaksana terhadap program, dukungan dari pelaksana dalam setiap pelaksanaan program, dan komitmen yang dilakukan pelaksana terhadap keberlanjutan program. Selain itu, diuraikan pula mengenai konflik-konflik yang muncul antar internal pelaksana dalam pelaksanaan program yang dapat berpotensi terhadap keberhasilan dari implementasi Program KOTAKU itu sendiri.

Melalui teori implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Horn tersebut, dapat dilihat variabel-variabel apa saja yang dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi suatu program. Variabel-variabel itulah yang menjadi tolak ukur apakah implementasi yang dijalankan di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro telah sesuai dengan tujuan program dan tepat sasaran atau tidak. Dengan demikian, adanya variabel tersebut dapat membantu menjelaskan mengenai realisasi dan ketepatan dengan tujuan awal dari Program KOTAKU.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Penggunaan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini dikarenakan bahwa peneliti ingin menggambarkan kondisi yang sebenar-benarnya terjadi di lapangan. Selain itu, peneliti ingin menggambarkan bagaimana permasalahan yang diambil yaitu perbandingan implementasi Program KOTAKU di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro dengan menyajikannya secara deskriptif. Hal ini dilakukan karena dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti dapat

menyajikan gambaran terkait perbandingan tersebut dengan lebih mendalam melalui kalimat-kalimat deskriptif.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam cakupan wilayah Desa Kalikondang, dan Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Lokasi ini dipilih karena kedua desa termasuk ke dalam lokasi yang telah menerapkan Program KOTAKU di Kabupaten Demak. Selain itu, salah satu desa yaitu Desa Kalikondang telah menerima penghargaan sebagai salah satu *best practice* dalam pelaksanaan Program KOTAKU sehingga dapat menjadi pembanding dengan Kelurahan Bintoro yang telah menerapkan program yang sama tetapi memiliki perbedaan dalam implementasi dan hasil dari implementasinya.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah para aktor pelaksana yang berada di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kelurahan/desa. Dalam hal ini, subjek penelitian sebagai penanggung jawab di tingkat kabupaten, adalah anggota POKJA PKP Kabupaten Demak beberapa di antaranya yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dan penanggung jawab di tingkat kelurahan/desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalikondang serta Lurah dan perangkatnya di Kelurahan Bintoro. Sedangkan subjek penelitian sebagai pelaksana utama yang melaksanakan program di tingkat kelurahan/desa adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro. Untuk

subjek penelitian yang menjadi sasaran dari program ini sendiri adalah masyarakat Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro.

#### **1.8.4 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga data yang dikumpulkan dan digunakan sendiri pada umumnya merupakan data lunak yang berupa kata-kata, ungkapan, kalimat, serta tindakan dan bukan jenis data keras yang berupa angka-angka statistik seperti pada penelitian kuantitatif. Beberapa macam data lunak tersebut merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif (Nugrahani, 2014).

Sumber data penelitian merupakan subjek tempat diperolehnya data yang diinginkan (Nurdin & Hartati, 2019). Berdasarkan sumbernya, data penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder (Siyoto & Sodik, 2015) yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti atau berasal dari sumber pertamanya secara langsung. Data primer diperoleh peneliti dengan cara mengumpulkannya secara langsung, baik melalui wawancara, maupun observasi. Data ini berguna untuk mengetahui lebih dalam terkait fokus dari penelitian ini sendiri yaitu perbandingan keberhasilan implementasi Program KOTAKU di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro karena diperoleh langsung setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.
- 2) Data sekunder merupakan data penunjang yang didapat dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya dengan berupa

dokumen-dokumen. Data ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu aktor atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Yaitu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, pemerintah desa, serta masyarakat di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro.

### **1.8.5 Teknik Pengambilan Informan**

Sampel dalam metode penelitian kualitatif memiliki sifat *purposive* yaitu sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian. Sampel yang digunakan lebih menekankan pada kualitas informasi, kredibilitas, dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan (Raco, 2018). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel yang menjadi informan penelitian. Pengambilan informan dilakukan bukan atas dasar strata, random, atau daerah. Teknik ini dilakukan dengan secara sengaja memilih orang atau kelompok tertentu dengan harapan mereka dapat memberikan informasi penting yang belum tentu didapat di informan lain (Firmansyah & Dede, 2022). Pemilihan *purposive sampling* merupakan sampel yang dipilih cermat sehingga dapat relevan dengan desain penelitian. Selain itu, penggunaan teknik ini juga diharapkan bahwa sampel dapat merepresentasikan wakil-wakil dari tiap lapisan populasi (Nurdin & Hartati, 2019).

Dengan menggunakan teknik tersebut, ditemukan subjek penelitian yang dapat menjadi narasumber untuk melihat perbandingan implementasi Program KOTAKU di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro. Sehingga, terlihat secara lengkap bagaimana persamaan atau perbedaan yang menjadi pembanding mengapa



hasil dari implementasi program di kedua desa dapat berbeda. Narasumber yang diambil untuk menjadi subjek penelitian ini yaitu dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, Perangkat Desa Kalikondang dan Kelurahan Kalikondang, Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat, dan dari Kelompok Swadaya Masyarakat.

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik atau metode pengumpulan data merupakan tata cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian melalui berbagai macam cara misalnya wawancara, observasi, dan dokumen (Raco, 2018). Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

- 1) Observasi. Observasi merupakan proses yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke objek penelitian serta melakukan pencatatan secara sistematis guna melihat dari dekat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan (Nurdin & Hartati, 2019). Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat bagaimana realita yang terjadi di lapangan sehingga dapat dilakukan analisis terkait data yang ditemukan. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan yaitu melalui pengamatan secara langsung ke lapangan dengan membuat lembar observasi untuk mengetahui fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Program KOTAKU. Kegiatan observasi dilakukan dengan melihat langsung di instansi/organisasi terkait yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak,

pemerintah desa dan kelurahan, serta masyarakat di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro yang sekaligus menjadi objek pengamatan. Observasi ini dilaksanakan dengan jangka waktu satu bulan, terhitung mulai tanggal 30 Oktober – 29 November 2023, atau sampai mendapatkan data/informasi yang diperlukan yaitu terkait implementasi Program KOTAKU yang dilakukan di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro yang kemudian dilakukan perbandingan sehingga terlihat mengapa program yang sama tersebut memiliki hasil yang berbeda pada implementasinya.

- 2) Wawancara. Wawancara merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melalui komunikasi verbal langsung dari sumbernya (Nurdin & Hartati, 2019). Teknik ini dilakukan agar mendapatkan informasi lengkap yang sulit diperoleh jika dibandingkan dengan teknik lain seperti observasi atau kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan terkait tujuan dari penelitian dengan metode tanya jawab dan bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan. Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi dan diperoleh melalui teknik pengambilan informan yang ditentukan.
- 3) Dokumen. Menurut Guba & Lincoln (dalam Nugrahani, 2014), mengemukakan bahwa dokumen dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari bahan tertulis, film, atau berkas-berkas yang dapat digunakan sebagai

penunjang data dalam penelitian. Dokumen ini berupa dokumen pribadi seperti rekaman video, surat-surat, foto dan sebagainya, serta dapat pula berupa dokumen resmi seperti data presentasi atau hasil rapat dan catatan penting lainnya terkait program atau kebijakan yang dilaksanakan dan dapat mendukung informasi yang didapat.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses pengolahan data mentah berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang memungkinkan peneliti menemukan hal-hal sesuai apa yang akan diteliti (Nurdin & Hartati, 2019). Penelitian ini menggunakan model analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman yang biasa dikenal dengan metode analisis data interaktif. Model ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Agusta, 2003). Dalam model ini, terdapat tiga komponen yang dikemukakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang dijabarkan dalam Nugrahani (2014) sebagai berikut:

- 1) Reduksi data. Dalam proses reduksi ini, peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat catatan ringkas mengenai isi dari catatan data yang diperoleh di lapangan yang dapat dilakukan dengan mencari dan

memusatkan tema, menentukan batasan dari suatu permasalahan, dan menuliskan catatan peneliti (*memo*).

- 2) Penyajian data. Penyajian data merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk menyusun dan menggabungkan informasi yang membantu peneliti agar dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan dalam hal tersebut. Data ini harus disusun dan disajikan secara sistematis dan sesuai dengan tema inti agar mudah dipahami interaksi antar bagiannya dalam konteks yang utuh. Proses ini dapat membantu peneliti untuk melakukan analisis data sehingga dapat merumuskan temuan-temuan dalam penelitian dan menarik kesimpulan akhir penelitian.
- 3) Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi peneliti terhadap temuan sebagai hasil wawancara atau dari dokumen. Penarikan kesimpulan ini ditangani secara longgar, terbuka, dan skeptis. Walaupun kesimpulan awal sudah disediakan sebelumnya, akan tetapi pada awalnya masih samar-samar hingga kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar kuat. Untuk memverifikasi simpulan tersebut dapat dilakukan dengan mengulangi langkah penelitian yaitu menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan.

#### **1.8.8 Validitas dan Realibilitas data**

Pengujian terkait kredibilitas suatu informasi yang didapat dalam penelitian harus dilakukan agar dapat digunakan sebagai data penelitian. Pengujian ini juga dilakukan agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai

acuan dalam menarik suatu kesimpulan. Data penelitian, menurut Subroto (dalam Nugrahani, 2014), setidaknya harus memenuhi dua syarat yaitu kesahihan (validitas) dan keajegan (realibilitas). Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi yaitu peneliti diarahkan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang tersedia karena data yang sama atau sejenis akan lebih kredibel. Sedangkan realibilitas data dalam penelitian ini diusahakan melalui pelaksanaan penelitian yang dapat diinterpretasikan dengan hasil yang sama. Dengan mengusahakan tercapainya realibilitas data, diharapkan dapat meminimalkan kekhilafan (*error*) dan penyimpangan (bias) dalam penelitian.